

**EVALUASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Rahmat Sidik¹, Septa Juliana²

Universitas Islam Riau

rahmatsidik@student.uir.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu dan Untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pihak BPBD Inhu telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti TNI dan Polri dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, namun hal ini belum dapat dikatakan maksimal mengingat ada faktor-faktor lain yang belum dapat dikendalikan secara maksimal seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya termasuk personel maupun peralatan. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan juga dapat menjadi faktor penghambat. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat, upaya-upaya BPBD Inhu akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. BPBD Inhu perlu melakukan kampanye sosialisasi yang lebih luas dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran serta pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan.

Keyword: Evaluasi, BPBD, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam, yang terbagi menjadi Provinsi, dan Provinsi-provinsi dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Desa ke Kecamatan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹ Indonesia dikenal

¹ Novianty, F. E. (2019). *Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd)* (Doctoral Dissertation,

sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan. Hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global.

Luas kawasan hutan Indonesia tahun 2012 mencapai 130,61 juta ha. Kawasan tersebut diklasifikasi sesuai dengan fungsinya menjadi kawasan konservasi (21,17 juta ha), kawasan lindung (32,06 juta ha), kawasan produksi terbatas (22,82 juta ha), kawasan produksi (33,68 juta ha) dan kawasan produksi yang dapat dikonversi (20,88 juta ha) Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6% dari total luas daratan Indonesia sehingga menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang rawan terjadi kerusakan karena kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat kerusakan hutan di Indonesia tahun 2012 mencapai 45% terbagi menjadi kerusakan kawasan hutan 32% dan di luar kawasan hutan 13% per tahun.²

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.³

Beberapa tahun terakhir, kebakaran lahan di Indonesia awalnya dianggap sebagai kejadian alam, namun muncul indikasi bahwa manusia mungkin memiliki peran dalam memicu kebakaran tersebut. Dugaan ini timbul karena adanya kepentingan beberapa pihak untuk memudahkan pembukaan lahan perkebunan baru. Awalnya, kebakaran di suatu lahan memiliki kapasitas api kecil dan tersebar pada beberapa titik, namun belakangan, kebakaran tersebut tidak lagi hanya dipicu oleh lahan dan tanah yang mengering. Indikasi sementara menunjukkan bahwa pembukaan lahan hutan baru untuk

Universitas Islam Riau).

² Umasangaji, S. (2017). Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 15(2), 121-130.

³ Herman, A., Muktiono, A., & Ridwan, M. (2023). Evaluasi Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Desa Sungai Perak Tentang Pentingnya Menjaga Lingkungan Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)*, 21(3), 125-134.

perkebunan dapat menjadi penyebab, tetapi kurangnya peralatan yang memadai dapat menyebabkan kebakaran meluas ke lahan lain. Faktor seperti jenis tanah, misalnya tanah gambut, juga mempengaruhi besarnya api dan kesulitan dalam proses pemadaman.⁴

Sejak tahun 1997 hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Kejadian Karhutla tahun 2015 diduga telah membakar hutan dan lahan seluas 2,61 juta hektar (BNPB, 2016). Di tahun 2016, meski Indonesia dilanda La Nina, Karhutla tetap terjadi yang membakar hutan dan lahan seluas 14.604,84 hektar.⁵

Di dalam dokumen *Grand Design* Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan yang dikeluarkan Bappenas, dijelaskan dalam periode 15 tahun terakhir, 2000-2015, puncak titik hotspot melebihi 15.000 terjadi pada tahun 2002, 2004, 2006, 2009, 2014 dan 2015. Kebakaran tersebut terjadi baik di dalam maupun di luar konsesi. Rata-rata titik panas selama periode tersebut 45% terdapat di wilayah konsesi dengan rincian 4% di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), 23% di areal IUPHHK Hutan Tanaman Industri sebesar, 16% di areal kebun kelapa sawit (KKS) dan 2% di areal tumpang tindih ketiganya. Selebihnya 55% terjadi di luar wilayah konsesi yakni 34% di kawasan hutan dan 21% di Areal Penggunaan Lain (APL). Adapun total luas kebakaran dalam periode 2000-2015 yang mencapai 101.791.661 hektar yang terjadi 34% di dalam konsesi dan 66% di luar konsesi.⁶

Daerah Provinsi Riau, juga merupakan salah satu daerah yang di kategorikan menjadi kawasan yang rawan akan kebakaran lahan, terutama pada saat musim kemarau. Pada saat musim kemarau ada indikasi bahwa ada oknum maupun masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk membuka lahan perkebunan baru. Sehingga mengakibatkan kabut asap yang berkepanjangan dan sampai pada level berbahaya untuk warga Riau dan daerah di sekitarnya. Kebakaran hutan dan lahan perkebunan selama tahun 2015 tersebar hampir diseluruh kabupaten di Provinsi Riau, namun yang terbesar terjadi di Kabupaten Pelalawan, dan yang kedua terbesar terjadi di kabupaten Indragiri

⁴ Azhari, Y., & Abduh, M. (2022). Analisis Pestles Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Provinsi Riau, Indonesia. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(2), 249-264.

⁵ Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Riau. *Jurnal Ham*, 12(3), 367-384.

⁶ Daryani, R., & Yustina, Y. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Lahan Gambut Upaya Pencegahan Kebakarahan Lahan Di Riau. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25092-25099.

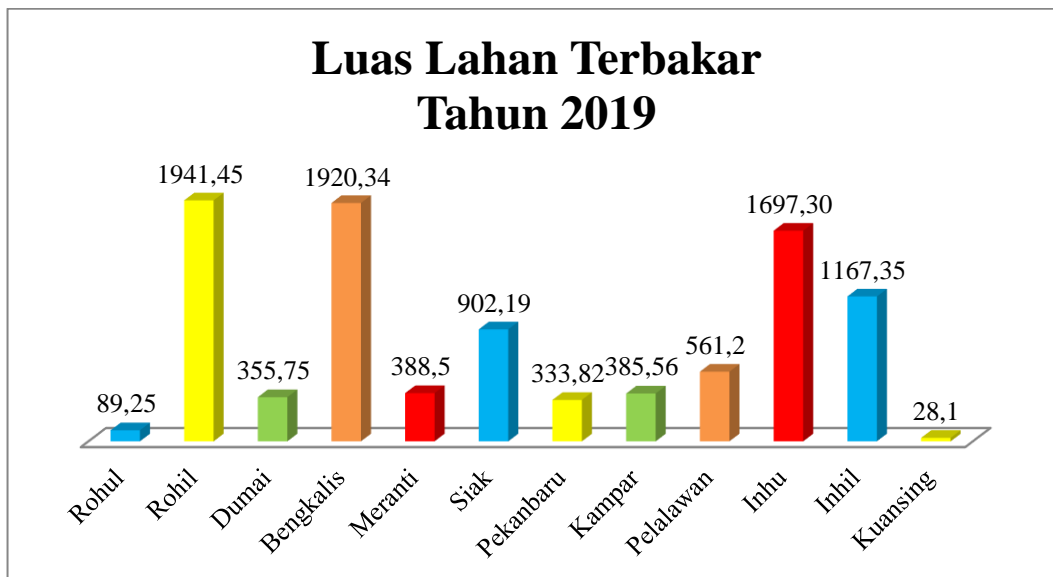
hulu, Siak, Indragiri Hulu dan Dumai. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Luas Areal yang Terbakar Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau 2019-2022

No	Kabupaten/Kota	Kebakaran Hutan & Lahan (Ha)			
		2019	2020	2021	2022
1	Rokan Hulu	89.25	32	58.25	336.00
2	Rokan Hilir	1941.45	60.15	153.20	202.50
3	Dumai	355.75	138.95	174.24	52.45
4	Bengkalis	1920.34	389.60	430.17	154.90
5	Meranti	388.5	44.20	53.00	32.35
6	Siak	902.19	174.56	112.13	18.56
7	Pekanbaru	333.82	24.66	25.10	19.38
8	Kampar	385.56	39.38	103.98	151.89
9	Pelalawan	561.2	145.60	109.75	114.20
10	Indragiri Hulu	1697.30	71.85	71.19	79.25
11	Indragiri Hilir	1167.35	481.5	165.50	85.50
12	Kuansing	28.1	1.5	0	0.50
Jumlah		9770.80	1603.95	1456.52	1,247.47

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui mengenai gambaran kejadian kebakaran hutan dan lahan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2019 hingga 2022. Tahun dengan jumlah kebakaran hutan dan lahan terbanyak adalah tahun 2019, dengan total luas area terbakar mencapai 9,770.80 Ha. Pada tahun ini, beberapa kabupaten/kota mencatat angka kebakaran yang signifikan. Kabupaten Indragiri Hulu adalah kabupaten dengan jumlah kebakaran hutan dan lahan terbanyak pada tahun 2019, mencapai 1,941.45 Ha. Ini menunjukkan bahwa Indragiri Hulu mengalami masalah yang serius terkait kebakaran hutan dan lahan pada tahun tersebut. Selain itu, Kabupaten Bengkalis juga mencatat jumlah kebakaran yang cukup tinggi pada tahun 2019, yaitu sebesar 1,920.34 Ha. Kedua kabupaten ini menonjol sebagai daerah dengan tingkat kebakaran yang signifikan, dan perlu adanya tindakan yang efektif untuk mengurangi risiko kebakaran di masa depan.



Gambar 1. Luas Lahan Terbakar Tahun 2019 (Ha)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, menetapkan sanksi hukum bagi pelaku yang terlibat dalam kerusakan hutan. Sanksi ini dapat mencakup denda, hukuman penjara, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran. Undang-Undang ini menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Implementasinya melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.⁷

Penyelenggaraan tentang hutan juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang di dalamnya memuat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, mencakup berbagai aspek seperti izin pengelolaan hutan, pengelolaan sumber daya hutan, penegakan hukum terkait illegal logging, dan upaya untuk melestarikan keberlanjutan ekosistem hutan.⁸

Meskipun sudah ditetapkan peraturan sedemikian rupa, namun masih saja terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hutan dan lahan adalah dua konsep yang berbeda, meskipun sering kali digunakan bersama-sama dalam konteks kebakaran hutan dan lahan.

⁷ Chandya, T. (2021). Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Ketapang. *Gorontalo Journal Of Government And Political Studies*, 4(1), 096-103.

⁸ Kospa, H. S. D., & Praja, A. A. (2023). Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal Rekayasa*, 13(1), 1-9.

Perbedaan utama antara hutan dan lahan terletak pada karakteristik fisik dan fungsinya. Hutan umumnya didefinisikan oleh vegetasi pepohonan yang padat dan beragam, sementara lahan mencakup berbagai jenis penggunaan tanah yang meliputi area untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, dan lainnya. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.⁹

Kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dihindari di Provinsi Riau, tidak terkecuali di Indragiri Hulu sebagaimana yang menjadi lokasi penelitian ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau menyatakan luas kawasan yang terbakar akibat karhutla di Sungai Raya Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mencapai 62 hektar. Lebih lanjut, Polres Inhu juga melakukan penangkapan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batang Gasal dengan total lahan 46,84 hektar.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, BPBD Inhu telah melakukan koordinasi dengan cara penanggulangan terhadap kebakaran hutan dan lahan tersebut, meskipun dikatakan berhasil namun tetap perlu adanya evaluasi terhadap BPBD tersebut. BPBD memiliki peran strategis dalam mengelola dan merespons kejadian darurat seperti kebakaran hutan. Evaluasi ini mencakup sejauh mana BPBD dapat memitigasi risiko kebakaran, seberapa efektif tanggap darurat yang dilakukan, dan sejauh mana upaya pencegahan dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa Renstra BPBD Inhu juga sudah sesuai dengan Renstra BNPB dimana diutamakan dalam hal Pengurangan Risiko Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BPBD mempunyai terkait dengan bencana, baik menyangkut penanganan maupun pencegahan bencana untuk mengurangi resiko bencana. BPBD Inhu didirikan untuk memegang tanggung jawab mengenai penanggulangan bencana, salah satunya yaitu kebakaran hutan dan lahan yang ada di Inhu berdiri dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana yang terbentuk pada tahun 2010 dan mulai beroperasi pada tahun 2011.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan

⁹ Kamaliah, K., Azhari, M., & Marlina, S. (2018). Evaluasi Pencegahan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Kab. Katingan Tahun 2016. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan (Mitl)*, 3(1), 1-5.

¹⁰ Oktavianty, P. A., Maulana, E., & Akbar, M. (2024). Manajemen Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Administratus*, 8(2), 80-91.

¹¹ Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2021). Evaluasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran Oleh Pemerintah Kecamatan. *Journal Of Administrative And Social Science*, 2(2), 50-60.

penanggulangan bencana pada fase pra bencana dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) BPBD Provinsi Riau yang sebelumnya dengan mempertimbangkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Provinsi Riau. Sebelumnya, terdapat perubahan fase penanganan bencana dari tanggap darurat menjadi pra bencana. RPB ini memuat pengenalan ancaman dan kerentanan masyarakat, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana, serta alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia di daerah. Proses penyusunan RPB memberikan kesempatan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar SKPD dalam pembagian tugas dan mengenali kewenangan masing-masing. Pengintegrasian RPB BPBD Provinsi Riau ke dalam RPJMD merupakan upaya strategis untuk memastikan ketersediaan pendanaan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.¹²

Penting untuk mengevaluasi apakah BPBD telah memberikan tanggapan yang cepat dan efektif terhadap kebakaran hutan dan lahan, mengkoordinasikan upaya dengan pihak terkait, dan menjalankan program penyuluhan untuk mencegah tindakan pembakaran lahan ilegal. Selain itu, evaluasi juga dapat memeriksa apakah BPBD telah berkolaborasi dengan penegak hukum dalam menindak pelaku pembakaran lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat beberapa fenomena permasalahan mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu selama beberapa tahun terakhir. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan, sering kali kebakaran masih terjadi secara signifikan. Evaluasi diperlukan untuk menilai sejauh mana upaya-upaya ini telah berhasil dalam mengurangi jumlah kebakaran dan lahan yang terbakar.

Evaluasi efisiensi penggunaan dana yang dialokasikan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sangat penting. Perbandingan antara jumlah dana yang dihabiskan dengan hasil yang dicapai akan mengungkapkan apakah sumber daya digunakan secara efektif dan apakah perlu penyesuaian dalam alokasi dana. Eterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko kebakaran. Evaluasi terhadap tingkat

¹² Ganie, D., Isroiya, I., & Buchori, D. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi Stiep*, 6(2), 1-8.

partisipasi, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat akan memberikan wawasan tentang efektivitas upaya-upaya ini. Evaluasi keberlanjutan dari kebijakan dan program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya ini tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.¹³

Rencana penanggulangan yang matang dan komprehensif akan sia-sia jika tidak dilaksanakan dengan baik. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana penanggulangan akan menunjukkan apakah ada hambatan atau tantangan dalam implementasinya dan bagaimana hal ini dapat diperbaiki. Dengan memperhatikan indikator-indikator di atas, penilaian holistik tentang permasalahan kebakaran hutan dan lahan dapat dibuat untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut serta perbaikan dalam upaya penanggulangan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Indragiri Hulu diakibatkan beberapa faktor antara lain akibat ulah manusia, adanya pembakaran lahan yang tidak terkontrol menyebabkan lahan yang terbakar merambah ke berbagai tempat lainnya. Selanjutnya, adanya iklim dan perubahan cuaca, adanya faktor ekonomi yaitu seperti pembukaan lahan untuk industri kayu atau kelapa sawit dan masalah *illegal logging*.
2. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. Ketidakefektifan sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hulu, yang hanya sekedar memberikan materi mengenai kebakaran tanpa menindaklanjuti dengan praktek-praktek yang mendukung dengan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
3. Kurangnya kemampuan SDM, kemungkinan terbesar kinerja dipengaruhi secara positif bila pimpinan itu mengimbangi dari hal-hal yang kurang dalam dari karyawan dalam situasi kerja dengan memberikan perhatian yang dapat meningkatkan semangat kerja yang bertujuan membuat kinerja seorang karyawan menjadi lebih baik lagi.

¹³ Ambarita, A. (2021). Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Rangka Melindungi Pemukiman Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Tatapamong*, 56-78.

4. Jumlah rekap luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu per Oktober 2023 mencapai 40 hektar tepatnya di Desa Sungai Raya. Perlunya dilakukan pemantauan kejadian bencana dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Inhu membuat laporan kejadian bencana.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut untuk mengetahui tentang bagaimana evaluasi BPBD Inhu yang dirangkum kedalam judul “Evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana datanya dipaparkan dengan cara deskriptif. Sesuai dengan fenomena yang di temukan dalam penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam penelitian ini Key Informan dan beserta informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu Informan kunci (*key informan*), Informan utama, dan Informan tambahan. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah membuat basis data kasus dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang di teliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan data sekunder yaitu berasal dari buku-buku, literatur, internet, majalah, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemilihan data yang akan dikode, menentukan data mana yang akan dibuang, mengidentifikasi pola-pola yang dapat meringkas sejumlah bagian yang tersebar, serta mendalami cerita-cerita yang sedang berkembang. Kedua, penyajian data. Pada tahap ini, peneliti membatasi penyajian data sebagai sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Ketiga, penarikan kesimpulan. Tahapan ini melibatkan proses menarik kesimpulan dan verifikasi yang dimulai sejak awal pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi BPBD dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu

Pada penelitian ini peneliti telah melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang telah ditunjuk sebagai informan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu. Evaluasi BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu adalah suatu proses yang penting untuk mengukur efektivitas dan kinerja BPBD dalam menangani ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

Evaluasi dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana BPBD telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini mencakup pengurangan jumlah kebakaran, luas area terbakar, kerugian materiil, dan korban jiwa akibat kebakaran. Evaluasi juga dapat mengukur efektivitas strategi yang diterapkan oleh BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ini mencakup analisis terhadap keberhasilan implementasi strategi seperti pemantauan aktif, respons cepat, kampanye sosialisasi, dan pembentukan kelompok relawan. Evaluasi juga penting untuk menilai tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, BPBD dapat meningkatkan efektivitas dan cakupan upaya penanggulangan. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengevaluasi ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh BPBD, seperti personel, peralatan, dan anggaran. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk menunjang keberhasilan operasional BPBD dalam penanggulangan kebakaran.

Evaluasi juga perlu mengevaluasi keefektifan sistem pemantauan dan early warning yang diterapkan oleh BPBD untuk mendeteksi dan merespons kebakaran hutan dan lahan secara dini. Dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan efektivitas BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dapat membantu identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, serta memberikan dasar untuk perbaikan

dan peningkatan di masa mendatang.¹⁴

1. Tingkat Pencapaian Tujuan BPBD Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam organisasi yang maju, peran pemimpin mencakup koordinasi dan pengawasan. Koordinasi berarti menyinkronkan waktu dan menyatukan tugas-tugas yang berbeda agar mengarah pada tujuan bersama. Hal ini dilakukan dengan membantu dan menyelaraskan tugas-tugas yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama.

Selain itu, BPBD dan pemangku kepentingan lain telah menyusun strategi bersama sebagai upaya meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini menunjukkan adanya kolaborasi dan perencanaan yang melibatkan berbagai pihak dalam menghadapi ancaman kebakaran. Dengan menyusun strategi bersama, mereka dapat mengidentifikasi langkah-langkah tepat dan alokasi sumber daya yang efektif.

Langkah selanjutnya adalah melakukan survei lokasi untuk mengevaluasi dan memetakan daerah-daerah rentan kebakaran. Hal ini memungkinkan BPBD mengumpulkan data akurat untuk merumuskan rencana tindakan yang lebih spesifik dan efektif. Secara keseluruhan, komitmen dan kerja keras BPBD beserta pemangku kepentingan dalam koordinasi, penyusunan strategi, dan survei lokasi diharapkan dapat meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di masa depan.

2. Efisiensi Anggaran BPBD Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Indragiri Hulu menghadapi beberapa kendala dalam alokasi anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Tidak ada anggaran khusus untuk melakukan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar, dan proses pencairan anggaran terhambat oleh banyaknya aturan yang mengatur. Selain itu, anggaran BPBD Indragiri Hulu yang bersumber dari APBD masih dianggap minim, terutama untuk melakukan pelatihan PLTB di setiap kecamatan.

Untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran BPBD, beberapa pendekatan dapat dilakukan. Pertama, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel melalui pemantauan dan pelaporan rutin. Kedua, prioritas penggunaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak besar dalam penanggulangan kebakaran, seperti pemeliharaan peralatan pemadam, pelatihan personel, kampanye sosialisasi, dan

¹⁴ Rini, R. S., Yuniarti, P., & Wianti, W. (2021). Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana Di Provinsi Riau. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 4(3), 588-597.

pemeliharaan infrastruktur penanggulangan. Ketiga, kolaborasi dengan pihak lain, baik itu pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, atau sektor swasta, untuk memanfaatkan sumber daya tambahan secara efektif. Keempat, penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti penggunaan sistem pemantauan atau manajemen anggaran berbasis digital.

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat BPBD Kabupaten Indragiri Hulu

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Pertama, sosialisasi dan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD hanya berfokus pada himbauan dan larangan, tanpa memberikan solusi konkret seperti pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar. Kedua, pelaksanaan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar yang seharusnya dilakukan oleh BPBD belum optimal, padahal kegiatan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau. Ketiga, koordinasi dan sosialisasi BPBD dinilai belum optimal karena kurangnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemimpin lokal. Untuk meningkatkan kinerja BPBD, penulis menyarankan beberapa strategi, yaitu melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara rutin, membentuk dan melatih kelompok relawan kebakaran di tingkat lokal, serta mengintegrasikan pendidikan pencegahan kebakaran ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan komunitas. Secara keseluruhan, peneliti menekankan perlunya refleksi dan perbaikan dalam kinerja BPBD agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melibatkan peran serta masyarakat.¹⁵

4. Tingkat Keberlanjutan BPBD Kabupaten Indragiri Hulu

Evaluasi terhadap tingkat keberlanjutan upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan hal penting untuk memastikan efektivitas jangka panjang. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya, penerapan strategi dan program, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan. Dalam mengelola sumber daya, BPBD harus memastikan

¹⁵ Arisandi, D., Syamsuadi, A., Gafar, T. F., Hartati, S., & Anugerah, M. F. (2020). Pembinaan Masyarakat Peduli Api Sebagai Bentuk Partisipasi Warga Desa Dayun Dalam Menangani Bencana Kebakaran Lahan. *Ikra-Ith Abdimas*, 3(3), 34-37.

ketersediaan dan pemeliharaan personel, peralatan, dan anggaran secara berkelanjutan. Selanjutnya, BPBD perlu mengevaluasi efektivitas program pencegahan, respons cepat, dan rehabilitasi pasca-bencana agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Partisipasi masyarakat juga harus dijaga dan ditingkatkan melalui upaya peningkatan kesadaran, pembangunan kapasitas, serta penguatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, BPBD harus memastikan koordinasi yang efektif dengan lembaga lain melalui mekanisme koordinasi yang baik dan sinergi yang kuat. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, BPBD dapat memahami sejauh mana upayanya berkelanjutan dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di masa depan.

5. Efektivitas Pelaksanaan BPBD Kabupaten Indragiri Hulu

Evaluasi efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui beberapa aspek penting. Pertama, perlu dievaluasi respons dan tanggap darurat BPBD, meliputi kecepatan dalam merespons laporan kebakaran, mengirimkan tim pemadam, serta efektivitas pemadaman dan penanganan pasca-kebakaran. Selanjutnya, strategi pencegahan yang diterapkan BPBD juga perlu dievaluasi, seperti efektivitas kampanye sosialisasi, pembentukan relawan, pemeliharaan lahan, dan pengawasan terhadap aktivitas berisiko. Kapasitas personel dan peralatan BPBD merupakan aspek lain yang penting dievaluasi untuk menilai kesiapan menghadapi kebakaran. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap koordinasi BPBD dengan instansi terkait lainnya, seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk menilai efektivitas kolaborasi dalam penanggulangan kebakaran. Yang terakhir, BPBD perlu dievaluasi dalam hal kemampuan memantau tren kebakaran serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan, agar dapat melakukan perbaikan di masa mendatang. Melalui evaluasi komprehensif pada aspek-aspek tersebut, BPBD Kabupaten Indragiri Hulu dapat memperoleh gambaran kinerja yang jelas dan merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Faktor Penghambat Bagi BPBD dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan. Berikut ini dijabarkan mengenai beberapa faktor penghambat yang dihadapi

oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal personel, peralatan, maupun anggaran. Kebakaran hutan dan lahan membutuhkan respon cepat dan efektif, namun keterbatasan sumber daya dapat menghambat kemampuan BPBD Inhu untuk merespons secara optimal. Keterbatasan personel, peralatan, dan anggaran merupakan hambatan utama dalam respons dan pemadaman kebakaran. Tanpa sumber daya yang memadai, BPBD Inhu akan kesulitan dalam menangani kebakaran secara efektif. Dalam mengatasi hal ini, BPBD Inhu perlu melakukan alokasi sumber daya yang optimal dan mencari dukungan tambahan dari pihak terkait.

2. Kondisi Geografis dan Cuaca

Di beberapa titik api yang tersebar di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau, terutama di area-area yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, cuaca yang ekstrim seperti kekeringan dapat meningkatkan risiko kebakaran dan mempersulit upaya pemadaman di beberapa tahun terakhir. Beberapa titik api di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki wilayah yang sulit diakses dan cuaca yang tidak menentu, yang dapat menyulitkan dalam penanganan kebakaran. BPBD Inhu harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam merancang strategi dan rencana respons kebakaran. Perubahan iklim dapat meningkatkan intensitas kebakaran hutan dan lahan serta membuatnya lebih sulit untuk diprediksi dan diatasi. BPBD Inhu perlu memiliki strategi yang adaptif dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap risiko kebakaran. Perubahan iklim menyebabkan kondisi cuaca yang lebih ekstrim dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. BPBD Inhu perlu memiliki strategi adaptasi yang lebih baik dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran yang lebih sering dan intens.

3. Aktivitas Manusia yang Memicu Kebakaran

Kebakaran hutan dan lahan sering dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, *illegal logging*, atau pembakaran sampah. Mengatasi faktor-faktor ini memerlukan kerjasama lintas sektor dan penegakan hukum yang kuat. Aktivitas manusia yang menjadi pemicu kebakaran, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, memerlukan penanganan yang terpadu antara BPBD Inhu dan

instansi terkait lainnya. Diperlukan tindakan preventif serta penegakan hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebakaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

4. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan juga dapat menjadi faktor penghambat. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat, upaya-upaya BPBD Inhu akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. BPBD Inhu perlu melakukan kampanye sosialisasi yang lebih luas dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran serta pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan.

5. Koordinasi antar Instansi Terkait

Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai instansi terkait seperti TNI, Polri, pemangku kepentingan lokal, dan lembaga non-pemerintah dapat menghambat efektivitas upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi yang kurang baik antara berbagai instansi terkait dapat menghambat respons yang cepat dan efektif terhadap kebakaran. BPBD Inhu harus memperkuat kerjasama lintas sektor dan membangun mekanisme koordinasi yang efisien untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran.

Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini, BPBD Kabupaten Indragiri Hulu dapat meningkatkan kemampuannya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut kepada masyarakat dan lingkungan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pihak BPBD Inhu telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti TNI dan Polri dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, namun hal ini belum dapat dikatakan maksimal. Terdapat faktor-faktor lain yang belum dapat dikendalikan secara maksimal, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya, termasuk personel maupun peralatan. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan juga dapat menjadi faktor penghambat. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat, upaya-upaya BPBD Inhu akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Kebakaran hutan dan lahan

sering dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar dan illegal logging. Mengatasi faktor-faktor ini memerlukan kerjasama lintas sektor dan penegakan hukum yang kuat. Aktivitas manusia yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan harus diatasi melalui tindakan preventif dan penegakan hukum yang efektif, sehingga upaya penanggulangan dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, A. (2021). Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Rangka Melindungi Pemukiman Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Tatapamong*, 56-78.
- Arisandi, D., Syamsuadi, A., Gafar, T. F., Hartati, S., & Anugerah, M. F. (2020). Pembinaan Masyarakat Peduli Api Sebagai Bentuk Partisipasi Warga Desa Dayun Dalam Menangani Bencana Kebakaran Lahan. *Ikra-Ith Abdimas*, 3(3), 34-37.
- Azhari, Y., & Abduh, M. (2022). Analisis Pestles Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Provinsi Riau, Indonesia. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(2), 249-264.
- Chandya, T. (2021). Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Ketapang. *Gorontalo Journal Of Government And Political Studies*, 4(1), 096-103.
- Daryani, R., & Yustina, Y. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Lahan Gambut Upaya Pencegahan Kebakaran Lahan Di Riau. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25092-25099.
- Ganie, D., Isroiya, I., & Buchori, D. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi Stiep*, 6(2), 1-8.
- Herman, A., Muktiono, A., & Ridwan, M. (2023). Evaluasi Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Desa Sungai Perak Tentang Pentingnya Menjaga Lingkungan Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)*, 21(3), 125-134.
- Kamaliah, K., Azhari, M., & Marlina, S. (2018). Evaluasi Pencegahan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Kab. Katingan Tahun 2016. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan (Mitl)*, 3(1), 1-5.
- Kospa, H. S. D., & Praja, A. A. (2023). Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal Rekayasa*, 13(1), 1-9.
- Novianty, F. E. (2019). *Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Oktavianty, P. A., Maulana, E., & Akbar, M. (2024). Manajemen Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(Bpbd) Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Administraus*, 8(2), 80-91.

- Rini, R. S., Yuniarti, P., & Wianti, W. (2021). Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana Di Provinsi Riau. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 4(3), 588-597.
- Umasangaji, S. (2017). Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 15(2), 121-130.
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Riau. *Jurnal Ham*, 12(3), 367-384.
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2021). Evaluasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran Oleh Pemerintah Kecamatan. *Journal Of Administrative And Social Science*, 2(2), 50-60.